

**STRATEGI PERTAHANAN PANGKALAN ANGKATAN LAUT (LANAL)
BANDUNG DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DARI SELATAN JAWA BARAT
(STUDI KASUS POSAL PANGANDARAN)**

**DEFENSE STRATEGY OF THE BANDUNG NAVAL BASE (LANAL) IN FACING
THREATS FROM SOUTHERN WEST JAVA
(CASE STUDY POSAL PANGANDARAN)**

Aziz Ali Haerulloh¹, Buddy Suseto², I Wayan Warka³

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

(aziz.alihaerulloh30@gmail.com, budiseto@ymail.com, iwayanwarka63@gmail.com)

Abstrak – Lanal Bandung dan unsur komando di atasnya Lantamal III memiliki keterbatasan satuan kapal patroli yang dapat melakukan deteksi dini, operasi keamanan laut, dan pengumpulan bahan intelijen. Saat ini, hanya Koarmada I yang dapat melakukan operasi keamanan laut dan pertempuran jika terjadi konflik di bagian selatan Jawa Barat. Kondisi ini membuat Lanal Bandung rentan jika tidak dapat beroperasi hingga 12-24 nm sesuai tanggung jawabnya yang berbatasan dengan laut lepas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kedaulatan oleh kapal asing di zona tambahan dan laut teritorial wilayah kerja Lanal Bandung serta penerapan strategi pertahanan lautnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi lapangan. Lanal Bandung memiliki kekuatan dalam pembinaan potensi maritim namun kekurangan unsur patroli yang memadai. Ancaman non militer sering muncul, sehingga Lanal Bandung dapat mengoptimalkan potensi dengan membangun komunikasi dengan komunitas nelayan dan Skadron Udara Angkatan Laut 700/PUTA. Kesimpulannya, Lantamal III perlu menambah jumlah dan kemampuan satuan kapal patroli serta UAV untuk memperkuat daya jangkauan dan strategi pertahanan menghadapi ancaman di perairan selatan Jawa Barat.

Kata Kunci: AUKUS, indo-pasifik, LANAL, patroli keamanan laut, strategi pertahanan laut.

Abstract – The Bandung Naval Base and its higher command, Lantamal III, need more patrol vessels capable of early detection, maritime security operations, and intelligence gathering. Currently, only Koarmada I can conduct maritime security operations and engage in combat if conflicts arise in the southern part of West Java. This situation leaves the Bandung Naval Base vulnerable if it cannot operate up to 12-24 nautical miles within its jurisdiction bordering the open sea. This study analyzes sovereignty violations by foreign vessels in the contiguous zone and territorial waters under the Bandung Naval Base's jurisdiction and evaluates its maritime defense strategy. The research method used is qualitative, with a case study approach involving in-depth interviews, literature review, and field observations. The Bandung Naval Base has strengths in developing maritime potential but lacks sufficient patrol units. Non-military threats often arise, so the Bandung Naval Base can optimize its potential by building communication with the fishing community and the Navy's Air Squadron 700/PUTA. In conclusion, Lantamal III needs to increase the number and capability of patrol vessels and UAVs to enhance the reach and defense strategy to address threats in the southern waters of West Java.

Keywords: AUKUS, indo-pacific, naval base, maritime security patrol, naval defense strategy

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, dan baru 16.056 pulau yang telah diberi nama serta terdaftar di PBB (Susmoro, 2019). Fakta menarik lainnya luas daratan Indonesia berdasarkan data Kemendagri mencapai 1.190.931.320 km² sedangkan luas lautannya menurut KKP mencapai 3.257.357 km² termasuk di dalamnya laut territorial 284.210 km², ZEE 2.981.211 km² (Marsetio, 2019).

Indonesia memegang tugas dan tanggung jawab yang besar dengan adanya empat *chokepoint* Internasional, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai. Empat *chokepoint* tersebut terbagi ke dalam tiga ALKI, ALKI I (Selat Malaka dan Sunda), ALKI II (Selat Lombok), dan ALKI III (Selat Ombai) (Hutagalung, 2017). ALKI memiliki nilai strategis dalam mengontrol SLOC (*Sea Lines of Communication*) perdagangan maritim internasional (Darmawan, 2018).

ALKI ini melewati pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Secara praktis rawan terjadi kejahatan maritim transnasional seperti perdagangan manusia, pencurian ikan, pencemaran lingkungan, dan penyelundupan barang-barang terlarang

oleh kapal asing yang melewati ALKI. ALKI I (Selat Sunda) salah satu ancaman paling potensial adalah IUU *Fishing*, penyelundupan, dan perdagangan manusia (Bakamla RI, 2023).

Permasalahan mengenai sistem pertahanan laut dan pantai yang relatif lemah di Kabupaten Pangandaran yang termasuk wilayah kerja Lanal Bandung, menjadi potensi ancaman jika Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS) melakukan tindakan ofensif.

Membangun pangkalan militer terluar secara masif di pulau-pulau terdepan milik Australia di Pasifik dengan kebijakan *new containment policy* Amerika Serikat terhadap Tiongkok (Nainggolan, 2016). Jakarta sebagai *Center of Gravity* (CoG) Indonesia secara umum hanya berjarak 500 km atau 269 nm dari Pulau Christmas sehingga potensi ancaman ini tidak dapat diabaikan (Sudirman et al., 2022).

AUKUS sendiri memiliki kepentingan nasional masing-masing untuk mengamankan jalur perdagangan maritim internasionalnya yang melalui Selat Malaka dan Selat Sunda.

Alasan keamanan strategis di atas patut dipertimbangkan dan diberikan perhatian khusus oleh TNI AL selaku

komponen utama pertahanan negara dari potensi ancaman kedaulatan negara dari luar yakni AUKUS.

Perairan laut Kabupaten Pangandaran harus diperkuat dengan sistem pertahanan negara yang mumpuni untuk menghadapi armada Angkatan Laut AUKUS, yang didukung oleh Australia dan USINDOPACOM. Armada ini menerapkan prinsip *offensive-active* dan seringkali menunjukkan sikap *show of force*.

Lanal yang memiliki batas wilayah kerja yang berhadapan dengan laut lepas agar dapat ditetapkan penarikan batasnya hingga batas zona tambahan (sejauh 24 nm yang diukur dari garis pangkal) sesuai Rezim Laut UNCLOS 1982 dan dengan demikian untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan di wilayah perairan tersebut. Lanal, disarankan agar dapat didukung dengan unsur-unsur patroli laut dengan kemampuan operasi di perairan laut dengan kondisi *sea state 3* (Dwi et al., 2016).

Wilayah kerja Lanal Bandung yang memiliki luas sebesar 6.130 nm perlu memiliki armada patroli, SAR, pemukul (kombat), dan pendukung. Luas wilayah yang besar saat ini belum diimbangi dengan kemampuan 5 R

(*Rebased, Refueling, Replenishment, Repair, Rest, and Recreation*) secara optimal dari pangkalan (Hardjono, 2018).

Lanal Bandung saat ini memiliki wilayah garis pertahanan pantai sejauh 479 km membentang dari bagian barat Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi hingga bagian timur di Kabupaten Pangandaran. Wilayah Kab. Pangandaran sendiri memiliki panjang garis pertahanan pantai sejauh 91 km. Lanal Bandung memiliki dua Posal: 1. Posal Pelabuhan Ratu, dan 2. Posal Pangandaran (Lanal Bandung, 2021)

Posal Pangandaran yang termasuk wilayah kerja Lanal Bandung berada di Kecamatan Pangandaran. Jarak antara Bandung dan Pangandaran yang menghubungkan kantor Lanal dan Posal ± 213,5 km setara 5 jam 42 menit Jl. Nasional III dan Jl. Raya Banjar – Pangandaran. Hal ini bisa menjadi kendala dalam mendukung kebutuhan logistik satuan di daerah.

Kelemahan dalam sisi suplai logistik tidak bisa diabaikan melihat kontelasi geopolitik kawasan yang sangat dinamis, selain itu dukungan artileri pertahanan pantai terkonsentrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pasmal 1). Dalam skenario terburuk apabila terjadi ancaman perang terbuka yang

melibatkan AUKUS dengan Tiongkok, Lanal Bandung harus mensiagakan personel dan armada di tiga lokasi Posal serta suplai logistik bisa dilakukan melalui jalur darat dan udara.

Demi mencegah musuh di wilayah zona perlawanan dan perang berlarut (zona tambahan dan laut teritorial) sangat sulit dilakukan. Jadi, sistem pertahanan berlapis dengan syarat terbentuknya zona pertahanan di wilayah kerja Lanal Bandung tidak terwujud dengan keterbatasan jumlah personil dan tidak adanya sistem senjata armada terpadu (Wangge et al., 2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan di zona tambahan dan laut teritorial khususnya di wilayah kerja Lanal Bandung (Studi Kasus: Posal Pangandaran), serta mengevaluasi strategi pertahanan laut yang diterapkan oleh Lanal Bandung dalam menghadapi permasalahan faktual dan potensi ancaman dari selatan Provinsi Jawa Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (deskriptif analitis). Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai

metode untuk mengeksplorasi, menggambarkan, dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2018). Masalah sosial adalah suatu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat contoh masalah sosial dan kemanusiaan adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, kependudukan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (Soekanto, 1986).

Proses penelitian ini melibatkan tahapan pengumpulan data yang terstruktur. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang mengikuti pedoman pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan 10 narasumber yang terdiri dari pejabat tinggi dan ahli di bidang pertahanan, termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2020-2023), Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Ketahanan Nasional, Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi, Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla, Atase Pertahanan Indonesia di Australia, Kasubdit Sunjaklakhaneg Kemhan, Komandan Lanal Bandung, Pasops Lanal Bandung, Paban I Asrena KSAL, Paban

Asintel Lantamal III, dan Komandan Posal Pangandaran. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan kajian literatur yang relevan

Tahap kedua, yakni kondensasi data, melibatkan pemilahan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang telah diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Tahap ketiga adalah penyajian data, yang biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif. Tahap keempat, penggambaran dan verifikasi kesimpulan, bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini seringkali menghasilkan hipotesis atau menentukan hubungan kausal antar variabel dalam penelitian (Huberman, 2014).

Pendekatan studi kasus untuk menganalisis pola strategi pertahanan laut di wilayah kerja Lanal Bandung yang secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah teritori persemakmuran Australia (*Christmas Island*), akan menjadi potensi ancaman potensial di masa yang akan datang dengan semakin kuatnya pengembangan senjata dan teknologi AUKUS. Di sisi lain masalah non militer

yang faktual mengenai imigran ilegal, *IUU Fishing* dan sebagainya menjadi permasalahan yang tidak kalah penting.

Hasil dan Pembahasan

Doktrin Pertahanan Negara

Indonesia berdasarkan sejarah perjalanan bangsa telah mengenal doktrin perang semesta dan strategi pertahanan atau peperangan yang menekankan pada kemandirian dalam suatu wilayah tertentu.

Doktrin Pertahanan Negara setelah Perang Kemerdekaan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Doktrin ini terbukti efektif dengan diperolehnya kemerdekaan secara penuh setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Salah satu contoh konkret dari perjuangan fisik masyarakat sipil adalah Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1945, yang menggalang perlawanan rakyat terhadap kekuatan kolonial (Ismail, 2020).

Pada tahun 1945-1949 (masa perang kemerdekaan) Indonesia menerapkan strategi *wehrkreise* (pertahanan melingkar) (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Strategi itu yang menjadi cikal

bakal dibentuknya organisasi komando gabungan wilayah pertahanan.

Pangkalan TNI AL Tipe Khusus

Pangkalan TNI AL terdiri dari kelas B, Khusus, C, dan D. Masing-masing berada di bawah tanggung jawab Pangkalan Utama TNI AL. Lanal Khusus disetarakan dengan Lanal Tipe B, umumnya lanal membawahi posal dan posmat. Namun dalam kondisi tertentu dengan kondisi wilayah, letak geografis dan pertimbangan lainnya dapat langsung berada di bawah lantamal (Dinas Penerangan Lantamal III, komunikasi pribadi, 7 Juni 2023).

Pangkalan TNI AL tipe khusus di seluruh jajaran Mabes TNI AL hanya terdapat tiga diantaranya: Lanal Bandung, Lanal Yogyakarta, dan Lanal Malang. Ketiganya memiliki Markas Komando (Mako) di wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa dan berlokasi di tiga provinsi yang berbeda yakni Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Tiga lanal tipe khusus umumnya saat ini dipimpin oleh kowal berpangkat kolonel dari korps (KH) atau khusus karena lanal tersebut setara dengan Lanal Tipe B, serta biasanya berlokasi di kota

pusat administrasi provinsi kecuali Malang. Keberadaan lanal tipe khusus yang menghadap Samudera Hindia bisa menjadi titik lemah dari postur pertahanan dan gelar kekuatan TNI AL di wilayah kerja Koarmada I (Lanal Bandung) dan Koarmada II (Lanal Yogyakarta dan Lanal Malang).

Lanal Bandung memiliki keterbatasan alat apung yang memadai dengan kondisi geografis wilayah kerja yang luas, jalur suplai logistik dari mako yang jauh, serta anggaran yang terbatas. Tantangan ini semakin diperburuk oleh kebijakan fiskal yang belum bisa dipecahkan.

Meskipun skema hibah bisa menjadi solusi, belum ada hibah yang bisa mendukung dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa menjadi harapan untuk membantu kebutuhan alutsista. Hal ini terutama penting karena industri jasa maritim di Provinsi Jawa Barat bagian selatan berkembang, dan perkembangan ini perlu beriringan dengan pemenuhan aspek pertahanan dan keamanan negara.

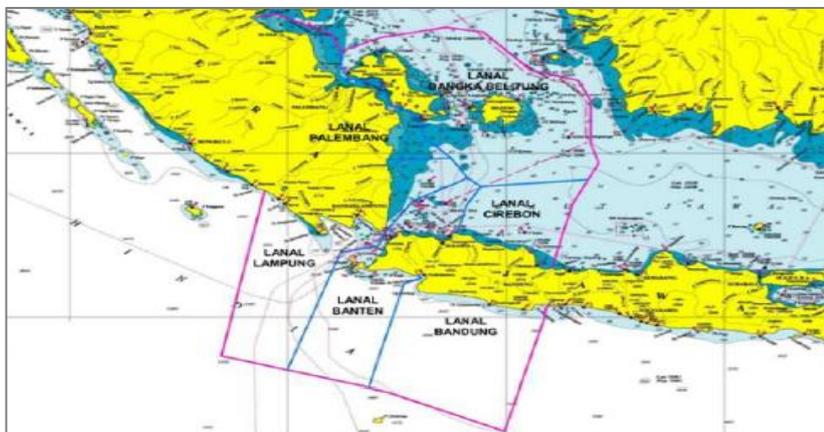
Pangkalan TNI AL Bandung

Lanal Bandung adalah satuan pelaksana di bawah Lantamal III Jakarta dalam jajaran Koarmada I, dengan tugas pokok mendukung logistik, pembinaan potensi maritim, dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL. Lanal ini juga berfungsi sebagai kekuatan wilayah keamanan laut (Lanal Bandung, 2021).

Sebagai "Lanal Khusus," Lanal Bandung tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung fungsi 5R (*Refuel, Repair, Rest & Recreation, Rearm, Replenishment*) sebagaimana yang dimiliki pangkalan TNI AL pada umumnya (N. Sopian, komunikasi pribadi, 15 November 2023). Dari lima fungsi tersebut, Lanal Bandung hanya dapat menjalankan fungsi rest & recreation secara optimal. Keterbatasan fasilitas ini juga berdampak pada operasi Posal di Lanal Bandung, yang biasanya berada di

wilayah pariwisata seperti Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng di Sukabumi, dan Pangandaran. Lanal Bandung juga menghadapi kendala dalam pembinaan potensi maritim, operasi intelijen, dan patroli keamanan laut (N. Sopian, komunikasi pribadi, 15 November 2023).

Contoh nyata adalah Posal Pangandaran, yang bertanggung jawab atas pengawasan di tiga kabupaten: Posmat Cikelet (Garut), Posmat Cipatujah (Tasikmalaya), dan Posmat Majingklak & Bojong Salawe (Pangandaran). Posal ini hanya memiliki sembilan babinpotmar, ditambah satu pejabat sementara komandan. Idealnya, setiap Posal harus dipimpin oleh seorang Komandan berpangkat Kapten dan didukung oleh tiga Perwira Pertama yang mengurus operasi, intelijen, dan pembinaan potensi maritim (Dadang, komunikasi pribadi, 30 November 2023).



Gambar 2 Wilayah Tanggung Jawab Lantamal III Jakarta
Sumber: Mabes TNI AL, 2016, sebagaimana dikutip dalam Ahmad, 2023

Tugas dan fungsi utama Posal mencakup operasi keamanan wilayah laut terbatas, intelijen, dan pembinaan potensi maritim, khususnya kepada kelompok nelayan. Operasi keamanan wilayah laut meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) menggunakan perahu karet bermotor dengan jangkauan hingga 3 nm.

Kegiatan intelijen rutin dilakukan untuk memantau dan menjaga sektor kerja dari ancaman non-militer. Selain itu, Posal juga bertanggung jawab atas pembinaan potensi maritim melalui program kampung bahari nusantara, yang berfokus pada pendidikan maritim (Dadang, komunikasi pribadi, 30 November 2023).

Posal Ujung Genteng, yang merupakan pengembangan dari Posal Pelabuhan Ratu dengan wilayah kerja yang luas, telah diresmikan pada 31 Oktober 2023 (N. Sopian, komunikasi pribadi, 15 November 2023). Sarana dan prasarana di Posal Pangandaran masih jauh dari ideal. Inventarisasi menunjukkan bahwa Posal ini hanya memiliki satu mobil

dinas yang dipinjam dari Pemda Kab. Pangandaran, lima motor dinas (empat hibah dari Lanal Bandung dan satu pinjaman dari Pemda Kab. Pangandaran), serta satu perahu karet, satu perahu katir, dan enam motor tempel dalam berbagai kondisi, dari rusak berat hingga siap pakai.

Swim vest yang tidak layak pakai sedang dalam proses pengadaan oleh Lanal Bandung dan menunggu pendistribusian. Terbaru, Posal Pangandaran menerima satu *speedboat fiberglass* sepanjang 10 m untuk patroli keamanan laut terbatas dari Kemhan (Dadang, komunikasi pribadi, 30 November 2023).

Unsur Babinpotmar berharap dukungan sarana dan prasarana yang lebih optimal, termasuk jumlah sepeda motor yang mencukupi, peralatan apung modern sesuai standar TNI AL, serta sistem *reward and punishment* yang tepat untuk meningkatkan semangat juang personil dalam menjalankan tugas negara.

Tabel 1. Pelanggaran di wilayah kerja Lanal Bandung

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran	Intensitas
1.	Non Militer	Ekspor Ilegal <i>Baby Lobster</i>	Sering
2.	Non Militer	<i>Illegal Logging</i>	Sering

3. Non Militer	KecelakaanLaut: 1. Kapal Tenggelam dan sebagainya 2. Orang Tenggelam dan Sebagainya	Kadang-kadang
4. Non Militer	Penambangan Pasir Ilegal	Jarang
5. Non Militer	Penangkapan Ikan menggunakan Cantrang	Sangat Sering

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

Lanal Bandung memiliki tiga posal namun setiap posal belum memiliki jumlah personil yang ideal seperti Posal Pangandaran.

Wilayah kerja Lanal Bandung rata-rata memiliki ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang relatif sama, terlebih Posal Pangandaran kurang personil sehingga tiap kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut ada yang tidak memiliki babinpotmar atau babinpotmar yang ada memiliki beban tugas yang berlebih.

Kebutuhan personil dan dukungan sarana berupa kendaraan bermotor menjadi tumpuan terutama setelah konsep posmat dan babinpotmar mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. 8 Tahun 2021 yang semula posmat adalah kantor representatif babinpotmar (*posmat centricity*) menjadi babinpotmar sebagai pusat dari posmat (*babinpotmar centricity*).

Lanal Bandung rentan terhadap infiltrasi angkatan laut AUKUS, terutama jika Perth menjadi pangkalan utama kapal selam nuklir mereka. Dengan keterbatasan alutsista saat ini, Posal Pangandaran menjadi target yang mudah dieksploitasi. Kapasitas deteksi ancaman dari bawah, permukaan, dan udara masih terbatas, sehingga meningkatkan risiko keamanan. Pengintegrasian Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS) dan penggunaan pesawat nirawak ScanEagle akan sangat memperkuat pertahanan dengan biaya operasi yang lebih efisien. Namun, Lanudal Jakarta sebagai operator pesawat nirawak berlokasi jauh, yang dapat mempengaruhi respons operasional.

Meskipun jalur perdagangan di selatan Jawa Barat tidak sepadat jalur utama lainnya, ancaman terhadap wilayah ini tetap signifikan dan membutuhkan perhatian strategis (Mutia et al., 2024).

Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) memiliki tiga strategi utama yaitu penangkalan, pertahanan berlapis, dan pengendalian laut. SPLN disusun untuk menghadapi dua kondisi damai dan perang. Pada kondisi damai tujuan yang ingin dicapai meliputi dua hal, yaitu menimbulkan dampak penangkalan serta menciptakan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali. Hal tersebut dicapai melalui diplomasi TNI AL, kehadiran di laut, operasi siaga tempur, dan operasi keamanan laut. Pada kondisi perang tujuan yang ingin dicapai menghancurkan kekuatan lawan yang berpotensi mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Demi mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan strategi pertahanan berlapis dan pengendalian laut (Aprianto, 2018).

Lanal Bandung sebagai salah satu pangkalan di Lantamal III Jakarta tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis di kawasan, SPLN sebagai strategi satu-satunya Doktrin TNI AL yang terbaru memiliki konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang, dan pertahanan semesta.

Wilayah kerja Lanal Bandung termasuk bagian dari pertahanan bagian

daerah perlawanan (12-0 nm). Salah satu tanggung jawabnya adalah memobilisasi kekuatan nasional (sishankamrata). Oleh sebab itu, fungsi pembinaan potensi maritim yang termasuk kategori OMSP teramat penting dalam masa damai agar ketika suatu saat terjadi kontijensi (masa krisis/perang) seluruh elemen masyarakat dapat dimobilisasi (R.Setiowati, komunikasi pribadi, 15 Januari 2024).

Lanal Bandung sebagai Lanal Khusus meskipun tidak terlibat dalam berbagai skenario gladi tugas tempur TNI AL (R.Setiowati, komunikasi pribadi, 15 Januari 2024). Namun tetap menjadi salah satu sumber daya TNI AL dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara masa perang sedangkan dalam masa damai tidak terlibat (Aprianto, 2018).

Lanal Bandung pada 2023 meresmikan Posal Ujung Genteng di Sukabumi sebagai salah satu upaya optimalisasi pembinaan potensi maritim di wilayah kerja yang begitu luas. Hal ini juga untuk menyikapi perkembangan organisasi TNI AL secara khusus dan TNI pada umumnya yang terus mengembangkan kotama dan sudah tidak menerapkan *zero growth*.

Lanal Bandung aktif terlibat mencegah kerugian negara melalui

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam menghadapi praktik ilegal seperti penyelundupan baby lobster, *illegal logging*, *illegal mining*, dan IUU Fishing, dan kecelakaan laut. Pada 2019 Lanal Bandung sukses menggagalkan penyelundupan 39.211 ekor benih lobster senilai 5,8 Miliar di Pantai Santolo, Kab. Garut (Puspen TNI, 2019).

POSAL Pangandaran

Berdasarkan analisa ancaman wilayah Lanal Bandung itu memiliki unsur-unsur pertahanan dan keamanan yang relatif lemah, panjang garis pantai yang dimiliki 479 km² (R. Setiowati, komunikasi pribadi, 15 Januari 2024). Satuan kapal patroli keamanan laut yang terbatas maksimal 3 nm sedangkan kewajiban lanal yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) adalah 24 nm (Dwi et al., 2016). Pangkalan pun disarankan agar didukung dengan unsur-unsur patroli laut dengan kemampuan operasi di perairan laut dengan kondisi sea state 3 (Dwi et al., 2016).

Satu hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah apabila dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik di kawasan, wilayah kerja Lanal Bandung khususnya Posal Pangandaran berbatasan langsung dengan wilayah

Pulau Christmas yang berada di bawah otoritas Australia. Secara umum CoG hanya berjarak 500 km setara 269,978 nm dan masuk dalam daya jelajah Kapal Selam Royal Australia Navy (RAN) kelas Collins 11.500-13.200 nm dengan kecepatan 10 knot setara 19 km/jam atau 12 mph (Wangge et al., 2012).

Pada dasarnya tugas operasi pertahanan dan keamanan laut tersebut adalah kewajiban Lanal Bandung hingga 24 nm (Dwi et al., 2016). Selebihnya 24-200 nm adalah tanggung jawab Lantamal III Jakarta dan lebih luas lagi hingga 200-350 nm adalah wewenang Koarmada I yang memiliki sarana yang lebih memadai (A. Abdullah, komunikasi pribadi, 29 November 2023). Melihat kondisi anggaran TNI Angkatan Laut yang terbatas sehingga sampai dengan saat ini belum memungkinkan untuk memiliki sarana patroli laut yang bisa beroperasi hingga 24 nm dan dukungan pangkalan yang memadai (S.Sambouw, komunikasi pribadi, 30 Oktober 2023).

Menurut Asisten Deputi Politik dan Strategi Dewan Ketahanan Nasional akan lebih proporsional apabila anggaran belanja angkatan/matra dipisahkan antara belanja pegawai (gaji, insentif, tunjangan dan lain-lain) dengan belanja serta investasi alutsista. Pada akhirnya

akan terlihat alokasi belanja dan investasi modal yang efektif guna mendukung transformasi dan modernisasi alutsista TNI secara umum (A. Sirait, komunikasi pribadi, 11 November 2023).

Salah satu titik lemah dari Posal Pangandaran adalah kondisi yang tidak memiliki kemampuan patroli keamanan laut yang memadai, salah satunya akan ada potensi kerawanan faktual wilayah kerja Lanal Bandung disusupi oleh penyelundupan narkoba dan sebagainya sedangkan kerawanan potensial adanya unsur kapal selam negara asing yang menyelam di sekitar laut teritorial dan zona tambahan. Oleh sebab itu, absennya unsur patroli dan dukungan sistem radar bawah laut sehingga kapal selam bertenaga nuklir negara lain akan leluasa mengeksploitasi wilayah tersebut (A. Sirait, komunikasi pribadi, 11 November 2023).

Perlu keterlibatan aktor keamanan laut lainnya dalam menjaga wilayah yang sering absen dalam perhatian tersebut, Bakamla Zona Maritim Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Lanal Bandung melakukan patroli bersama. Melalui skema sektor patroli yang berbeda. Mengingat besarnya potensi ekonomi maritim di

selatan Provinsi Jawa Barat karena menjadi habitat ikan pelagis besar dan kecil yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar domestik dan internasional dengan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Azizah et al., 2023).

Posal Pangandaran terlibat aktif bersama kelompok rukun nelayan, kelompok masyarakat tanggap bencana, dan komunitas pecinta alam dalam menerapkan strategi penggalangan untuk menghadapi berbagai potensi kerawanan di Kab. Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran (D. Darjat, komunikasi pribadi, 30 November 2023).

Para Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) secara rutin melakukan pembinaan potensi maritim serta komunikasi sosial dengan komunitas nelayan di masing-masing sektor kerja. Mereka memberikan edukasi tentang keselamatan maritim sekaligus mengumpulkan informasi terbaru mengenai kondisi cuaca, gelombang laut, dan aktivitas maritim yang mencurigakan. Informasi ini kemudian dilaporkan ke Lanal Bandung sebagai bagian dari upaya pembinaan potensi maritim dan intelijen maritim.

Kelompok masyarakat tanggap bencana bekerja sama dengan Pos Pengamat Angkatan Laut (Posal) Pangandaran dalam kegiatan latihan mitigasi bencana. Mereka bersama-sama membuat rute evakuasi untuk menghadapi potensi tsunami, memberikan penyuluhan kepada berbagai kelompok dan instansi, serta mengadakan latihan *Search and Rescue* (SAR) di laut yang sering terjadi kecelakaan.

Selain itu, komunitas pecinta alam, baik dari sekolah maupun non-sekolah, aktif dalam kegiatan bersama masyarakat. Mereka terlibat dalam bakti sosial dan gotong royong, seperti membersihkan sungai dan pantai. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan mendukung program-program pemerintah daerah.

Pos Pengamat (POSMAT) TNI AL Cikelet

Posmat Cikelet, yang melayani beberapa kecamatan di pesisir selatan Jawa Barat, menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan wilayahnya yang luas dan mayoritas dihuni oleh nelayan. Kecamatan seperti Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, dan Cibalong

berada di bawah tanggung jawab Posmat ini, dengan dua Babinpotmar (Pembinaan Potensi Maritim) mengawasi aktivitas di area tersebut.

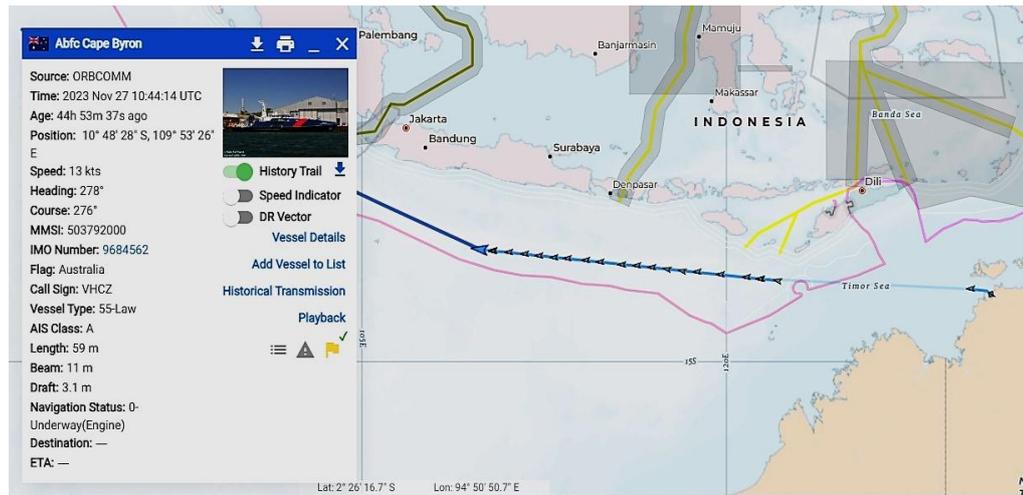
Kondisi geografis dan keterbatasan alutsista membuat pemantauan 24 jam sulit dilakukan, terutama ketika menghadapi ancaman tak terduga atau anomali maritim. Mengingat mahalnya biaya implementasi Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS), penggunaan pesawat nirawak ScanEagle sebagai alternatif lebih ekonomis dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif. UAV ini mampu terbang hingga 16 jam dan meningkatkan kemampuan ISR (*Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*) serta membantu dalam operasi SAR (*Search and Rescue*).

Penggunaan teknologi modern ini memungkinkan kehadiran maritim yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik konvensional di laut. Untuk jangka panjang, Lanal Bandung perlu merencanakan penguatan dalam manajemen teknologi tinggi, seiring dengan peningkatan jumlah personel militer dan cadangan, guna menghadapi potensi ancaman yang terus berkembang.

Pos Pengamat (POSMAT) TNI AL Cipatujah

Posmat Cipatujah memiliki wilayah tanggung jawab sepanjang 56 km garis pantai, Kec. Cipatujah sendiri memiliki 15 desa, Kec. Karangnunggal memiliki 14

desa, dan Kec. Cikalong memiliki 13 desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2018). Total ada 42 desa yang berada di bawah tanggung jawab Babinpotmar Posmat Cipatujah.



Gambar 3. Pelanggaran Wilayah ZEE Indonesia

Sumber: F. Supriady, komunikasi pribadi, 4 Desember 2023.

Data diatas menunjukkan kapal patroli Australian Border Force Cape Byron melintasi wilayah ZEE Indonesia di bagian selatan Pulau Jawa yang bisa menjadi indikasi awal adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya yang lebih berat dan mengancam keamanan nasional.

Indonesia saat ini belum memiliki kemampuan untuk mengintersep apabila hal serupa terjadi dengan jenis kapal perang yang melintas, adanya ScanEagle yang berada di bawah Skadron Udara 700/PUTA diharapkan bisa menjawab

tantangan tersebut meskipun perlu alat apung tambahan dari darat ke laut untuk memperluas jangkauan wilayah operasinya.

Disisi lain Indonesia dan Australia telah menginisiasi *confidence building measure* diantara keduanya dengan pengiriman kadet untuk mengisi program pertukaran pelajar dalam beberapa semester, pertukaran perwira menengah untuk sekolah staf dan komando di masing-masing angkatan, dan perwira menengah dan tinggi mengikuti kursus singkat di lembaga *think tank* nasional

seperti Lemhannas RI dan *Centre for Defence and Strategic Studies* (Australia) (IKAHAN, 2021).

Adanya upaya di atas tidak berarti menghilangkan potensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain baik disengaja maupun tidak disengaja, Lantamal III Jakarta yang memiliki unsur KRI Satuan Kapal Patroli diharapkan dalam beberapa tahun ke depan memiliki KRI yang bisa membawa pesawat nirawak ScanEagle hingga wilayah laut teritorial.

Melihat kondisi geografis Tasikmalaya yang begitu luas akan sangat sulit bagi Babinpotmar di Posmat Cipatujah yang membawahi tiga kecamatan yang berbatasan secara langsung dengan laut lepas yakni Kec. Cipatujah, Karangnunggal, dan Cikalong. Babinpotmar Posmat Cipatujah yang hanya dua orang: Sertu (Mes) Rahmat Abidin dan Kopka (Navigasi) Riyanto untuk memastikan tugas pokok dan fungsi posmat sebagai kepanjangan tangan dari Posal Pangandaran terlaksana secara optimal dirasa sulit (D. Darjat, komunikasi pribadi, 30 November 2023).

Harapan kedepan dengan adanya unsur Guskamla dan Bakamla RI yang beroperasi di selatan Provinsi Jawa Barat

akan menambah kekuatan dan mengurangi kerugian negara akibat praktik IUU Fishing di ZEE Indonesia, serta mendorong industri jasa maritim Indonesia dalam bidang perikanan tangkap semakin gencar melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE Indonesia.

Sumber protein nasional Indonesia dalam rangka menyambut 100 tahun usia kemerdekaan diupayakan telah mencapai swasembada pangan dengan sumbangan protein terbesar dari sektor kelautan, dan sumbangan industri maritim terhadap PDB Indonesia bisa mencapai angka lebih dari 50%. Laut sebagaimana amanat dari Presiden Soekarno menyimpan kekayaan terbesar bangsa Indonesia maka oleh karena itu sudah seharusnya menjadi bangsa yang berkarakter bahari (Darmawan, 2018).

Pos Pengamat (POSMAT) TNI AL Bojong Salawe dan Majingklak

Posmat Bojong Salawe berada di Kab. Pangandaran bagian barat dan Posmat Majingklak berada di Kab. Pangandaran bagian timur. Kab. Pangandaran memiliki panjang garis pantai hingga 91 km, hasil dari pemakaran sebelumnya Kab. Ciamis. Kab. Pangandaran secara geografis berada

pada koordinat 108° 41-109° Bujur Timur dan 07° 41-07° 50 Lintang Selatan, luas wilayah Kab. Pangandaran yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha.

Luas wilayah laut tersebut berdasarkan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya alam tingkat pemerintah kabupaten/kota hanya sejauh 0-4 nm sedangkan pemerintah provinsi 4-12 nm.

Adanya pembagian dalam zona pengelolaan perikanan tangkap diharapkan dapat lebih optimal dalam proses eksplorasi dan eksploitasi dengan tetap memperhatikan status kuota dari berbagai jenis komoditas tangkapan, mempertimbangkan aspek keberlanjutan serta melestarikan ekosistem ikan.

Pangandaran sebagai daerah strategis di selatan Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan atensi dari unsur-unsur pimpinan TNI AL, dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya isu untuk meningkatkan status Posal Pangandaran menjadi Lanal Tipe D (Maarif, 2016). Namun, dalam beberapa tahun terakhir baru Lanal Kaimana, Provinsi Papua Barat, Lanal Sarmi, Provinsi Papua, Lanal Pacitan, Provinsi Jawa Timur yang naik tingkat dari Posal ke Lanal Tipe D.

Kerawanan di Pangandaran meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan berubahnya status laut di selatan Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi merah (kerawanan tinggi) dalam rencana daerah patroli nasional. Hal itu disebabkan oleh temuan satu ton narkoba di Pantai Madasari, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran (Aminah, 2022).

AUKUS Ancaman Potensial di Lanal Bandung

Australia saat ini sedang menjalani transformasi dalam berbagai hal salah satunya alutsista bawah air yakni Kapal Selam bertenaga nuklir. Proyek strategis ini diinisiasi dengan sekutu anglo-saxon (Inggris dan Amerika Serikat). Potensi dari adanya perlombaan antara dua kekuatan *superpower* di Indo-Pasifik mendorong Australia bergabung dalam aliansi Amerika Serikat untuk menghadapi Tiongkok (Haerulloh & Martani, 2023).

AUKUS adalah jawaban dari meningkatnya kemampuan dan pengaruh ekonomi dan militer Tiongkok, sebab ada istilah *prosperity & military* ibaratkan dua sisi mata uang untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan harus memiliki kekuatan

militer yang kuat untuk melindungi kekayaan tersebut dari ancaman negara lain. Teori *Balance of Power* menekankan keseimbangan perlu diciptakan untuk menghindari *abuse of power* (Morgenthau, 1948).

Tiongkok memandang pangkalan luar negeri AS yang tersebar di Indo-Pasifik sebagai ancaman begitu pula sebaliknya AS memandang pangkalan Tiongkok di LCS sebagai ancaman potensial.

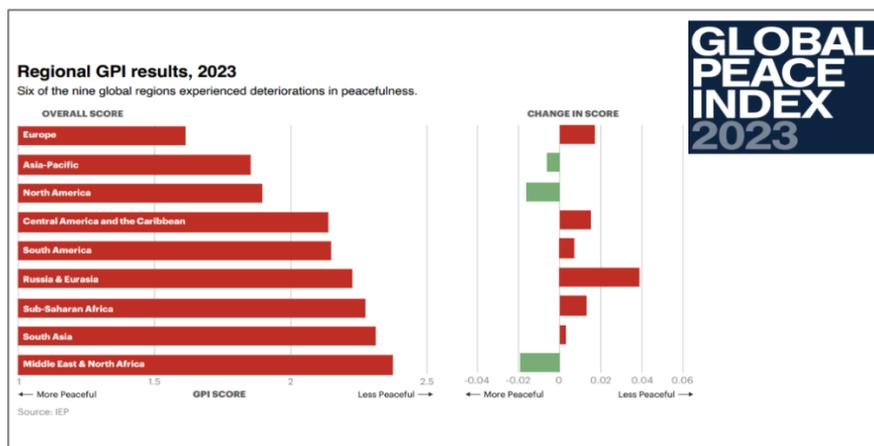
Tiongkok dan negara kawasan Asia Timur lainnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. AS sebagai kekuatan unipolar sejak Uni Soviet runtuh 1991, bersikap paranoid dengan hadirnya Tiongkok sebagai negara *superpower* baru. AS sejak perang dingin sudah menggalang kekuatan Persekutuan dalam menghadapi ancaman komunisme (Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Kamboja) mulai dari ANZUS berdiri sejak 1 September 1951, SEATO berdiri sejak 8 September 1954 – 30 Juni 1977, dan AUKUS berdiri sejak 15 September 2021 (Korwa & Wambrauw, 2023).

AS berusaha mempertahankan status quo melalui strategi pertahanan pangkalan *offensive-active* dan *fleet in*

being dengan USINDOPACOM serta sekutu. Tiongkok mengimbanginya dengan membangun kemitraan strategis BRI dengan berbagai negara di berbagai kawasan seperti memberikan pinjaman modal jangka panjang untuk infrastruktur strategis contohnya pelabuhan dan kereta cepat di Indonesia (Rakhmat & Purnama, 2023)

Inggris dan AS mendorong Australia untuk mengadaptasi tenaga nuklir sebagai kekuatan pendorong kapal selam generasi terbarunya. Sebab dua negara pertama telah mengadopsi teknologi tersebut lebih dahulu, dalam rangka meningkatkan operabilitas antar angkatan laut ketiga negara demi menunjang ketersediaan suku cadang dan menekan biaya produksi.

Di sisi lain Australia telah meratifikasi kebijakan kawasan bebas nuklir, ini menjadi dilema dalam negeri terhadap kebijakan Pemerintah Australia. Hal ini diperkirakan untuk menghadapi armada Tiongkok yang berorientasi blue water navy dan bervisi maritim setelah berganti dari kontinental defense policy sejak era Deng Xiaoping. Alasan utama adalah bisnis Tiongkok yang berjalan di berbagai kawasan perlu pengamanan ekstra (*outward looking*).



Gambar 4. Indeks Perdamaian Dunia

Sumber: Wirayudha, komunikasi pribadi, 9 desember 2023.

Gambar 4 di atas menyimpulkan bahwa meskipun Kawasan Asia-Pasifik/Indo-Pasifik secara keseluruhan telah mengalami peningkatan skor indeks perdamaian, tidak serta merta menghilangkan potensi konflik yang masih ada dengan skor secara keseluruhan mendekati angka 2.

Selama ini Indonesia terlalu fokus dengan ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM). Atensi terhadap wilayah Pasifik selatan belum menjadi fokus utama Indonesia dalam menghadapi gejala konflik di Indonesia Timur khususnya beberapa Provinsi di Pulau Papua, melalui forum itu Indonesia bisa membangun narasi diplomasi mengenai pembangunan *human centricity* dan mengeliminir narasi pembangunan yang menggunakan kekuatan bersenjata di bumi Papua.

Selain ASEAN, ada dua forum yang membutuhkan kehadiran Indonesia secara lebih aktif dalam membangun equilibrium kawasan Indian Ocean Rim Association Iora (IORA) dan South Pacific Defense Ministry Meeting (SPDMM).

Lanal Bandung sebagai bagian dari Lantamal III Jakarta, memiliki wilayah yang relatif dekat dengan AUKUS. Lanal Bandung dengan status sebagai lanal khusus, memiliki keterbatasan dalam mendukung tugas operasi keamanan laut dan fungsi intelijen maritim.

Pertama, keterbatasan alat apung/alutsista menjadi kesulitan sebab fungsi utama Lanal Bandung sebagai lanal khusus yang protokoler. Tidak, memungkinkan apabila bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Lanal Bandung secara penuh.

Kedua, potensi konflik hari ini yang semakin dinamis menjadi dampak tambahan bagi Lanal Bandung. Meskipun pusan konflik yang potensial terjadi bukan di Samudera Hindia melainkan di Laut Cina Selatan. Pengembangan industri kapal selam AUKUS menjadi efek penggentar, bagi negara-negara Asia Tenggara dan Indo-Pasifik yang berusaha merebut hegemoni dari negara-negara anglo-saxon.

Ketiga, kebijakan fiskal negara yang terbatas menjadi kendala utama bagaimana satuan pangkalan TNI AL mengalami berbagai kendala alutsista, fasilitas pangkalan, dan personil. Masalah fiskal bisa dibidang adalah perihal klasik yang biasa dialami oleh berbagai negara dalam memenuhi kebutuhan terhadap alat dan peralatan pertahanan dan keamanan.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Dalam lima tahun terakhir, kejahatan laut meningkat secara fluktuatif, dengan pelanggaran oleh kapal asing, termasuk kasus kapal penjaga pantai Australia yang mematikan AIS di wilayah kerja Lanal Bandung. Potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik Barat memerlukan Lanal

Bandung untuk siap mengantisipasi dampaknya terhadap keamanan wilayah.

Dalam mensiasati keterbatasan alutsista konvensional, Lanal Bandung perlu mengajukan permohonan untuk penyediaan pesawat nirawak maupun UUV untuk menunjang tugas ISR yang lebih kompleks dan rumit di masing-masing Posal. Usulan tersebut atas pertimbangan konstelasi geopolitik kawasan yang semakin dinamis dan tidak mudah diprediksi.

Lanal Bandung harus memperkuat kemampuan ISR dengan penambahan UAV dan IMSS untuk meningkatkan pengawasan dan respons terhadap ancaman di wilayah Posal Pangandaran. Strategi Fleet in Being dan patroli terkoordinasi dengan Australia perlu diperkuat untuk menjaga keamanan wilayah perairan yang berbatasan langsung. Lanal Bandung dapat mengadopsi strategi ini untuk menghindari kekalahan besar dan tetap mempertahankan kehadiran yang kuat di wilayah yang kritis. Dalam masa damai, Lanal Bandung dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk meningkatkan keamanan maritim.

Keterbatasan infrastruktur dan personel di Lanal Bandung mengurangi efektivitas operasi maritim. Posal dengan

fasilitas minimalis tidak sepenuhnya mendukung tugas-tugas pertahanan yang kompleks, dan status Lanal sebagai Lanal Khusus lebih fokus pada fungsi protokoler daripada keamanan maritim.

Daftar Pustaka

- Aminah, A. N. (2022). *TNI AL Perkuat Keamanan Maritim di Pangandaran*. Republika.
<https://news.republika.co.id/berita/rgaklr384/tni-al-perkuat-keamanan-maritim-di-pangandaran>
- Aprianto, N. P. (2018). *Information Technology Design TNI AL Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara* (A. Bandono (ed.); 1st ed.). CV. Bintang (Penerbit Bintang Surabaya).
[http://repository.idu.ac.id/2808/1/Information Technology Design Tni Al Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara.pdf](http://repository.idu.ac.id/2808/1/Information%20Technology%20Design%20Tni%20Al%20Guna%20Mendukung%20Strategi%20Pertahanan%20Laut%20Nusantara.pdf)
- Azizah, Y., Marliana, I., Agustina, S., & Natsir, M. (2023). Kondisi Stok Perikanan di WPPNRI 573. In *Jakarta: Fisheries Resources Center of Indonesia, Rekam Nusantara Foundation*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. (2018). Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka. In *BPS Kabupaten Tasikmalaya* (Vol. 66).
<https://tasikmalayakab.beta.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/786d81a367845945b2bf72co/kabupaten-tasikmalaya-dalam-angka-2020.html>
- Bakamla RI. (2023). *Revisi Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024*. Bakamla RI.
https://bakamla.go.id/uploads/static_page/Revisi_Renstra_Bakamla_RI_Tahun_2020-2024.pdf
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=s4ViswEACAAJ>
- Darmawan, L. M. T. N. I. P. I. (2018). *Menyibak gelombang menuju negara maritim: kajian strategis mewujudkan poros maritim dunia* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TV5uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menyibak+Gelombang+Menuju+Negara+Maritim.+Yayasan+Pustaka+Obor+Indonesia&ots=iP9OnmGD0V&sig=WF3jLVh6dC7CNMD5P557p3CYLeo&redir_esc=y#v=onepage&q=Menyibak Gelombang Menuju Negara Ma](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TV5uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menyibak+Gelombang+Menuju+Negara+Maritim.+Yayasan+Pustaka+Obor+Indonesia&ots=iP9OnmGD0V&sig=WF3jLVh6dC7CNMD5P557p3CYLeo&redir_esc=y#v=onepage&q=Menyibak%20Gelombang%20Menuju%20Negara%20Maritim)
- Dwi, G., Trismadi, T., Adrianto, D., & Djunarsjah, E. (2016). Konsep Penyempurnaan Batas Wilayah Kerja Lanal-Lanal di Jajaran Lantamal III Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004: The Concept of Completing the Boundary of the Lanal-Lanal Work Area in the Line of Lantamal III Vie. *Jurnal Chart Datum*, 2(1), 52–60.
<https://jurnal.sttalhidros.ac.id/index.php/chartdatum/article/view/32>
- Haerulloh, A. A., & Martani, R. F. (2023). Analisis Geopolitik Abad 21 di Indo-Pasifik Dan Persiapan Indonesia Dalam Menyikapi Konflik di Laut Cina Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 187–201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55>

- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+Data+Analysis:+A+Method+s+Sourcebook+&ots=kGTG4JVTUN&sig=XDKfzvcMIBq2nsb7aC2HXzsKlsl&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative+Data+Analysis%3A+A+Methods+Sourcebook&f=false
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75–91. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/502>
- IKAHAN. (2021). *IKAHAN Kilas Balik (2011-2021)*. <https://www.ikahan.com/2021/04/kilas-balik-one-decade>
- Ismail, H. F. (2020). *NU, Moderatisme, dan Pluralisme: Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan* (Nurr (ed.); 1st ed.). IRCiSoD. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=weDMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA384&dq=Pengurus+Bes ar+Nahdlatul+Ulama+\(PBNU\)+pada+tahun+1945,+yang+menggalang+p erlawanan+rakyat+terhadap+kekua tan+kolonial&ots=Meul5JqJC9&sig=YL_2mh24JwtEiNPdPMQk3WAc5wl&redir_esc=y#v=](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=weDMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA384&dq=Pengurus+Bes ar+Nahdlatul+Ulama+(PBNU)+pada+tahun+1945,+yang+menggalang+p erlawanan+rakyat+terhadap+kekua tan+kolonial&ots=Meul5JqJC9&sig=YL_2mh24JwtEiNPdPMQk3WAc5wl&redir_esc=y#v=)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Strategi Pertahanan Negara*. Kementerian Pertahanan RI.
- Korwa, J. R. V., & Wambrauw, M. S. F. (2023). A Constructivist Analysis of the Establishment of the AUKUS Security Pact and its Implications for Regional Stability in the Indo-Pacific. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 19–35. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.36888>
- Lanal Bandung. (2021). *Profil LANAL Bandung*. Profil. <https://lanalbandung.com/profil/#:~:text=Dengan tugas pokok dukungan logistik%2C administrasi%2C bagi unsur-unsur,pembinaan Potensi Maritim menjadi kekuatan wilayah keamanan laut.>
- Maarif, S. (2016). *Pos TNI AL di Pangandaran akan Ditingkatkan jadi Lanal Tipe D*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1096349/14/pos-tni-al-di-pangandaran-akan-ditingkatkan-jadi-lanal-tipe-d>
- Marsetio, M. (2019). *Kepimpinan Nusantara: Archipelago Leadership* (1st ed.). Universitas Pertahanan RI.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. Revised Edition by Kenneth W. Thompson. New York: Knopf.
- Mutia, A. S., Mahroza, J., Sudiarso, A., Harsono, G., Suseto, B., & Sukendro, A. (2024). *Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia II* (L. Y. Prakoso (ed.); 1st ed.). CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567501/mengamankan-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>

- Nainggolan, P. P. (2016). Kepentingan Strategis Amerika Serikat Di Asia-Pasifik. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/download/329/263>
- Puspen TNI. (2019). *Pangkalan TNI AL Bandung Gagalkan Penyelundupan 39.211 Ekor Benih Lobster Senilai 5,8 Miliar Di Pantai Santolo Garut*. Berita. <https://tni.mil.id/view-150417-pangkalan-tni-al-bandung-gagalkan-penyelundupan-39211-ekor-benih-lobster-senilai-58-miliar-di-pantai-santolo-garut.html>
- Rakhmat, M. Z., & Purnama, Y. (2023). *Bagaimana Menghindari Kualitas Investasi yang Rendah dan Jebakan Utang?* <https://celios.co.id/2023/policy-paper-polemik-china-menghindari-investasi-berkualitas-rendah-dan-jebakan-utang/>
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi: suatu pengantar* (47th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Rebecca, C. U. (2022). Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(2), 129–138. <https://www.academia.edu/download/95801681/pdf.pdf>
- Susmoro, H. (2019). *The Spearhead of Sea Power* (A. Giyanto (ed.)). Pandiva Buku. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=The+Spearhead+of+Sea+Power&btnG=
- Wangge, H. Y. R., Edy, P. supervisor, Keliat, M., Asra, V., & Widjajanto, A.

(2012). *Perubahan karakteristik pengembangan angkatan laut Australia dalam dua periode terakhir (1990-2010) = The changing characteristic of the Australian navy in two latest period (1990-2010)* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20299554#:~:text=Tesis ini membahas perubahan karakteristik pengembangan Angkatan Laut,Australia menjadi kekuatan laut regional %28regional sea power%29.>